

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR: 100.3.3.7 - 04 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DPRD PROVINSI BANTEN PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 26 Maret 2024, disepakati pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan oleh Pantita Khusus DPRD:
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);
- Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : 123/F-Gerindra/DPRD/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 Perihal Pengajuan Anggota Pansus LKPJ Gubernur Banten Tahun 2023;
 - 2. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 001/F.PDIP/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 perihal Usulan Nama-Nama Pansus LKP;
 - 3. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 03/FPG/DPRD/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 Perihal Pansus LKPj Gubernur Banten Tahun 2023;
 - 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 200/FPKS/DPRD-B/III/2024 tanggal 28 Merat 2024 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 - 5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 02/FPD/DPRD-Banten/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 Hal Usulan Nama Nama Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten TA. 2023;
 - 6. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 50/FKB/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Pengajuan Usulan Nama Anggota Pansus;
 - 7. Surat dari Fraksi Amanat Nasional Nomor : 001/F.PAN.DPRD/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
 - 8. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 04/F PPP.DPRD/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 Perihal Pengajuan Anggota Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023;
 - 9. Surat dari Fraksi Partai NasDem PSI Nomor : 06/F. NasDem-PSI/DPRD-Banten/III/2024 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus LKPj Gubernur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Panitia Khusus I DPRD Provinsi Banten

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU:

1. Melaksanakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran

2023;

2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan

stakeholders;

3. Melaporkan pembahasan kepada Pimpinan DPRD;

4. Melaporkan hasil akhir pembahasan dalam Rapat

Paripurna.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus paling lambat 30 (tiga puluh)

hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023 diterima oleh

DPRD.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh

Sekretariat DPRD.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran

2024.

KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 28 Maret 2024

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

M. NAWASAID DIMYATI

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Nomor : 100.3.3.7 – 04 Tahun 2024

Tanggal : 28 Maret 2023

Tentang : Pembentukan Panitia Khusus I DPRD Provinsi Banten

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur

Banten Tahun Anggaran 2023

PANITIA KHUSUS I DPRD PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	UNSUR
1.	ANDRA SONI, S.M., M.AP	PIMPINAN DPRD
2.	BARHUM, H.S., S.IP., M.IP	PIMPINAN DPRD
3.	M. NAWA SAID DIMYATI	PIMPINAN DPRD
4.	H. AGUS SUPRIYATNA, S.H., M.H., M.Si	FRAKSI PARTAI GERINDRA
5.	H. OONG SYAHRONI	FRAKSI PARTAI GERINDRA
6.	YUDI BUDI WIBOWO	FRAKSI PARTAI GERINDRA
7.	ТОНА	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
8.	MUHLIS, S.H	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
9.	Dr. YEREMIA MENDROFA, S.T., M.M., MBA	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
10.	H. FITRON NUR IKHSAN, M.Sc	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	Drs. H. MUHAMMAD FAIZAL, S.H., MH	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	Ir. H. M. BONNIE MUFIDJAR, M.Si	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
13.	H. JUHENI M. ROIS, Lc., M.Pd	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	H. MAHPUDIN	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
15.	HERI HANDOKO, S.E., M.IP	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
16.	H. DEDI HARYADI, S.E	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
17.	AGUS FAHRUDIN, S.E	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
18.	HADI MAWARDI	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
19.	H. UBAIDILLAH, S.E	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
20.	Prof. Dr. Ir. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M	FRAKSI NasDem PSI

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

M. NAWA SAID DIMYATI

MAIB